

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI  
UMUM, DAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN DAN  
KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2019-2021**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh :

**INDAH WULANDARI WILUJENG**

**NIM : 4319154**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2023**

**PENGARUH PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,  
DANA ALOKASI UMUM, DAN KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL  
KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT  
PERIODE 2019-2021**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh:

**INDAH WULANDARI WILUJENG**

**NIM : 4319154**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Wulandari Wilujeng  
NIM : 4319154  
Judul Skripsi : **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,  
dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap  
Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa  
Barat Periode 2019 – 2021**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Juni 2023

Yang menyatakan



Indah Wulandari Wilujeng

## NOTA PEMBIMBING

**Jilma Dewi Ayu Ningtyas, M.Si**

Petodanan Timur RT 002/RW 002, Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi sdr. Indah Wulandari Wilujeng

Yth.

Dekan Fakultas dan Ekonomi Bisnis Islam

c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Syariah

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sepenuhnya, maka bersama ini saya

kiriman naskah skripsi saudara:

Nama : Indah Wulandari Wilujeng

NIM : 43191514

Judul Skripsi : **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan.

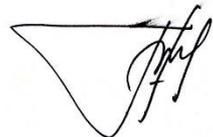
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 27 Juni 2023

Pembimbing



**Jilma Dewi Ayu Ningtyas, M.Si**

**NIP.199101092020122016**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Kab Pekalongan Kode Pos 51161  
Website : [www.febi.uingusdur.ac.id](http://www.febi.uingusdur.ac.id) | email : [febi.uingusdur@ac.id](mailto:febi.uingusdur@ac.id)

**PENGESAHAN**

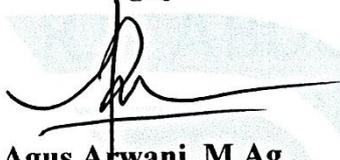
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi saudari:

Nama : **Indah Wulandari Wilujeng**  
NIM : **4319154**  
Judul : **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021**  
Dosen Pembimbing : **Jilma Dewi Ayu Ningtyas, M.Si.**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).

Dewan Penguji,

**Penguji I**

  
**Agus Arwani, M.Ag**  
NIP. 197608072014121002

**Penguji II**

  
**Aditya Agung Nugraha, M.E.**  
NIP. 19008112019031008

Pekalongan, 11 Agustus 2023

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
**Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.**  
NIP. 197502201999032001

## **MOTTO**

*“Orang lain gak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita. Yang mereka ingin tau hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri, walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”*

*Fardi Yandi*



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi bekal untuk masa depan dan bisa bermanfaat bagi sesama manusia. Dengan ini saya persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua tercinta. Bapak Moekhammad Toelus dan Ibu Ekha Lestari yang selalu mendoakan serta mendukung dalam penyelesaian Skripsi.
2. Adik saya, Muhammad Dzannun Mata dan Hunna Himmah Safiqoh
3. Sahabat dan teman-teman saya Kholis, Siti Zulfa, Nadia, Safira, Izzul, Alfath, Novi, Pipit dan Fitria yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing, Ibu Jilma Dewi Ayu Ningtyas, M.Si yang selalu membantu serta mengarahkan penelitian hingga penulisan Skripsi ini terselesaikan.
5. Dosen Wali, Ibu Ria Anisatus Sholihah, MSA yang selalu mengarahkan dalam masa perkuliahan.
6. Teman-teman Program Studi Akuntansi Syariah 2019 yang telah menemani sepanjang masa perkuliahan.
7. Seluruh orang-orang disekitar saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan setiap dukungan dan semangat pantang menyerah saat pengerjaan skripsi ini.

## ABSTRAK

### **INDAH WULANDARI WILUJENG. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021.**

Belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset tetap lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah dan terdapat batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam peraturan kepala daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal diantaranya Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai sumber pembiayaan juga pengukuran kinerja keuangan daerah dalam pelaksanaan belanja modal baik untuk kelancaran urusan pemerintahan maupun peningkatan sarana dan prasarana publik. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diproses oleh rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, derajat desentralisasi fiskal, dan rasio ketergantungan. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal.

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan software SPSS versi 26. Menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumenter serta menggunakan teknik *total sampling* sehingga didapat 81 sampel yang terdiri dari 27 Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2019 – 2021.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Ketergantungan dan Rasio Desentralisasi Fiskal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sementara itu, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas PAD secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

**Kata Kunci:** Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

## ABSTRACT

### **INDAH WULANDARI WILUJENG. The Influence of Local Own Revenue, General Allocation Funds, and Local Government Financial Performance on Regency and City Capital Expenditures in West Java Province for the 2019 – 2021 Period**

Capital expenditure is part of regional expenditure which is used to budget expenditures made in the context of procuring fixed assets and other fixed assets which have a useful life of more than 12 (twelve) months, are used in local government activities and there is a regulated minimum capitalization of fixed assets. in regional regulations. Factors that affect capital expenditure include the influence of regional original income (PAD), general allocation funds (DAU), and regional government financial performance as a source of financing as well as measurement of regional financial performance in the implementation of capital expenditure both for the smooth running of government affairs and for improving facilities and infrastructure public. Financial performance in this study is proxied by the independence ratio, the PAD effectiveness ratio, the degree of fiscal decentralization, and the dependency ratio. The purpose of this study was to examine the effect of regional original income (PAD), general allocation funds (DAU), and local government financial performance on capital expenditure.

This research is quantitative using SPSS version 26 software. It uses secondary data with data collection techniques using the documentary method and uses a total sampling technique so that 81 samples consisting of 27 District and City Governments in West Java Province are obtained for the period 2019–2021.

The results found that PAD and DAU partially had a significant effect on capital expenditure. Regional Government Financial Performance in the form of Dependency Ratio and Fiscal Decentralization Ratio partially has a significant effect on capital expenditure. Meanwhile, the Regional Government Financial Performance in the form of the Independence Ratio and the PAD Effectiveness Ratio partially have no effect on Capital Expenditures.

**Keywords:** Capital Expenditure, Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Local Government Financial

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat- Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Ibu Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Dr. H. Tamamudin, M.M selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Ade Gunawan, M.M selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Ibu Ria Anisatus Sholihah, M.S.A selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus sebagai Dosen Penasihat Akademik (DPA)
6. Ibu Jilma Dewi Ayu Ningtyas, M.Si selaku Dosen pembimbing skripsi penulis.
7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan material dan moral.
8. Sahabat saya Siti Zulfa, Nadia, Safira, Novi, Pipit, Alfath dan Izzul, semua teman yang telah meberikan do'a, dukungan dan semangat selama menjalani perkuliahan dan penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Akuntansi Syariah angkatan 2019.
10. Teman-Teman Organisasi saya UKM Seni Musik El-Fata sebagai wadah pengembangan diri penulis selama menjadi mahasiswa.

Akhir kata, saya berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 26 Juni 2023

Penulis,



Indah Wulandari Wilujeng



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>16</b>
A. Deskripsi Teori .....	16
1. Teori Stewardship .....	16
2. Belanja Modal .....	17
3. Pendapatan Asli Daerah .....	19
4. Dana Alokasi Umum.....	22
5. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	23
B. Telaah Pustaka .....	26
C. Kerangka Berpikir.....	31
D. Hipotesis .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian .....	37

B. Jenis Penelitian .....	37
C. Setting Penelitian .....	37
D. Populasi dan Sampel .....	37
E. Variabel Penelitian.....	38
F. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	45
H. Metode Analisis Data.....	45
1. Uji Statistik Deskriptif .....	45
2. Uji Asumsi Klasik .....	46
3. Uji Linear Berganda .....	48
4. Uji Hipotesis .....	49
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	50
B. Hasil Analisis Data .....	51
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Simpulan .....	76
B. Keterbatasan Penelitian.....	76
C. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
Lampiran I Data PAD, DAU dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	II
Lampiran II Uji Statistik Deskriptif .....	V
Lampiran III Uji Normalitas .....	VI
Lampiran IV Uji Multikolinearitas .....	VII
Lampiran V Uji Heteroskedastisitas dan <i>Scatterplot Model</i> .....	VIII
Lampiran VI Uji Autokorelasi .....	X
Lampiran VII Uji Regresi Linear Berganda.....	XI
Lampiran VIII Uji t .....	XII
Lampiran IX Koefisien Determinasi .....	XIII
Lampiran X Tabel Nilai t .....	XIV
Lampiran XI Daftar Riwayat Hidup .....	XV

## TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	ħ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	de
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

## B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

## E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

	فُرُوضٌ		
--	---------	--	--

## F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan

### Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْتٍ : ditulis *mu'anntaś*

## G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعة : ditulis *as-sayyi'ah*

## I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## J. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)

ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

### K. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَعَقِّدِينَ	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

### L. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

### M. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

### N. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

### O. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan

Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنْتٌ : ditulis *mu'anntaś*

### P. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
---	------------------------------------	---------	-----------------

2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>
---	----------------------------------------	---------	-----------------

#### Q. Kata Sandang Alif + Lam

3. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

4. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السيعة : ditulis *as-sayyi'ah*

#### R. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

3. Ditulis kata per kata, atau  
4. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Belanja Pegawai dan Belanja Modal Terhadap Total Belanja Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2021 .....	2
Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2021 .....	6
Tabel 3.3 Tingkat Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2021 .....	8
Tabel 4.4 Tingkat Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2021 .....	8
Tabel 4.5 Tingkat Rasio Ketergantungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021 .....	8
Tabel 4.6 Rasio Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021 .....	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	26
Tabel 3.1 Definisi Operasional .....	43
Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Autokorelasi .....	48
Tabel 4.1 Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat .....	50
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	51
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas .....	55
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas .....	56
Tabel 4.6 Uji Glejser .....	59
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi .....	60
Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	61
Tabel 4.10 Hasil Uji t .....	64
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	67

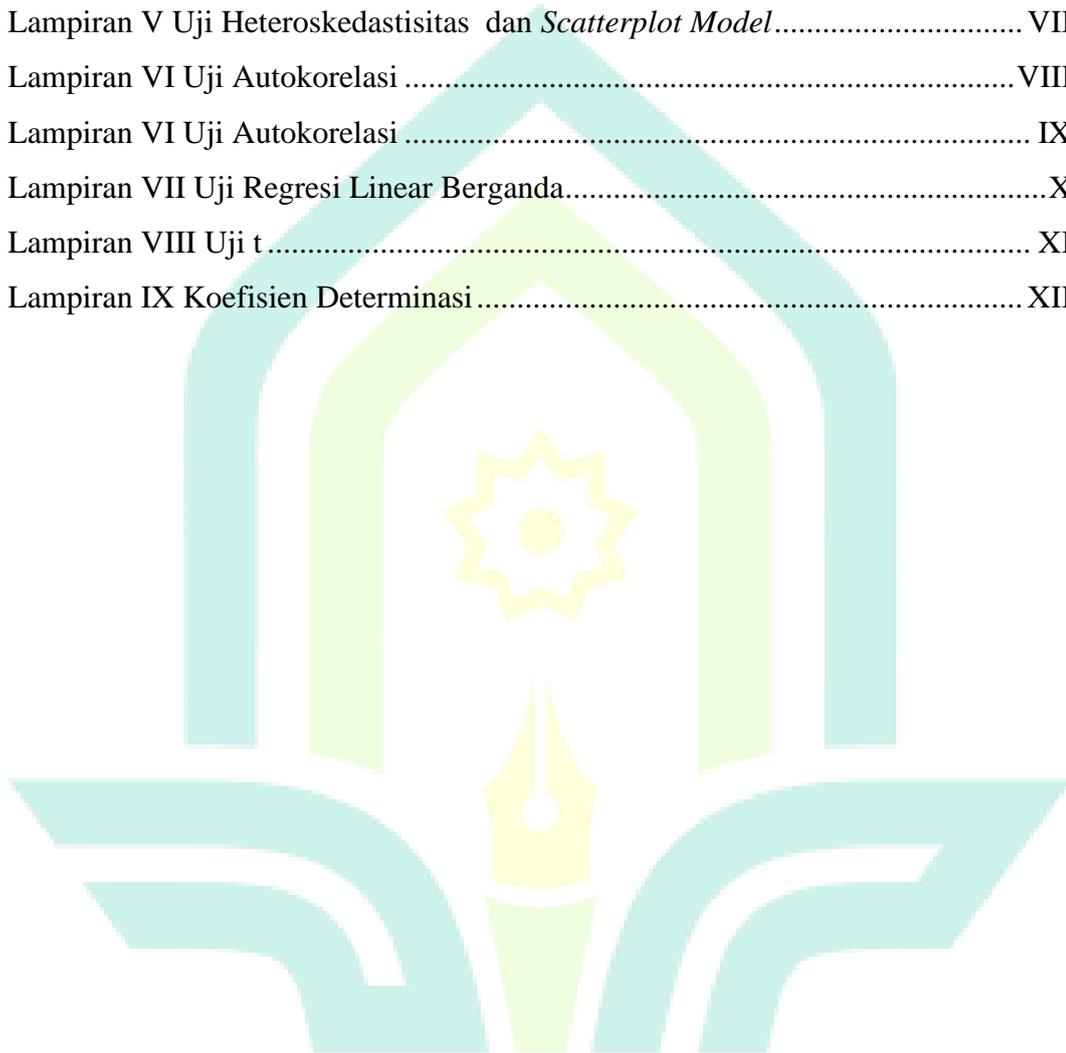
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir.....	4
Gambar 4.5 <i>Scatterplot Model</i> .....	58



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Data PAD, DAU dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	II
Lampiran II Uji Statistik Deskriptif .....	IV
Lampiran III Uji Normalitas .....	V
Lampiran IV Uji Multikolinearitas .....	VI
Lampiran V Uji Heteroskedastisitas dan <i>Scatterplot Model</i> .....	VII
Lampiran VI Uji Autokorelasi .....	VIII
Lampiran VI Uji Autokorelasi .....	IX
Lampiran VII Uji Regresi Linear Berganda.....	X
Lampiran VIII Uji t .....	XI
Lampiran IX Koefisien Determinasi .....	XII



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Awal tahun 1997, ketika pemerintah Indonesia dilanda krisis ekonomi, pemerintah mendelegasikan sebagian dari otoritas pengelolaan keuangannya kepada daerah dengan keyakinan bahwa daerah dapat membiayai berbagai inisiatif pembangunan dan layanan masyarakat berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Peraturan yang berkaitan dengan otonomi daerah dimulai dengan disahkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tugas, hak, dan kekuasaan suatu daerah untuk mengatur dirinya sendiri dan bertindak untuk kepentingan umum dikenal sebagai “otonomi daerah.” Dengan kata lain otonomi daerah dijalankan dengan maksud mengembangkan potensi daerah, menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat, pengelolaan sumber daya daerah, serta indikator kemandirian pemerintah daerah (Hastuti, 2018).

Pengalokasian belanja modal secara mandiri termasuk salah satu wujud dari otonomi daerah. Akuisisi aset tetap yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah seringkali merupakan mayoritas dari belanja modal. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal keuangan daerah. Perkembangan suatu daerah dapat dipengaruhi oleh seberapa baik keuangannya dikelola.

**Tabel 1.1 Belanja Pegawai dan Belanja Modal Terhadap Total Belanja  
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021**

<b>Tahun</b>	<b>Total Belanja</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>Belanja Modal</b>
2019	129.716,96 M	42.591,30 M	19.634,12 M
2020	128.048,15 M	41.030,29 M	14.070,13 M
2021	130.637,22 M	41.210,71 M	15.530,13 M

*Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2023)*

Berdasarkan tabel diatas, semua model belanja di Provinsi Jawa Barat banyak dialokasikan untuk belanja pegawai. Sedangkan, sebaiknya APBD yang dialokasikan kepada belanja pegawai dikurangi, sehingga dapat diberikan kepada belanja modal yang sifatnya dapat digunakan dengan waktu lama. Meskipun fenomena ini terjadi pada beberapa pemerintah daerah, akan tetapi hal ini merupakan sebuah permasalahan karena idealnya peningkatan atau besarnya penerimaan juga diikuti dengan peningkatan belanja modal. Selain itu juga terjadi fluktuasi pada belanja modal. Menurut kajian yang dilaksanakan Universitas Gadjah Mada bahwa ada banyak daerah dengan jumlah belanja pegawai diatas 30%. Untuk mengurangi alokasi belanja pegawai wajib dilaksanakan secara perlahan-lahan. Bahkan ada juga presentase 60-70% dana APBD dihabiskan untuk kegiatan administrasi juga kepegawaian. Oleh karena itu, suntikan dana dari pemerintah pusat melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sangat diperlukan unruk membangun pemerintah daerah (Kristianus, 2022).

Thomas (2019) menyatakan bahwa Sri Mulyani, seorang menteri keuangan negara telah mengamati bahwa perjalanan dinas tampaknya

menggunakan sekitar 13,4 persen dari dana APBD. Selanjutnya, menyumbang sekitar 17,5% dari layanan kantor. Saat ini, besarnya belanja pegawai mencapai sekitar 36%. Menteri keuangan mencapai kesimpulan bahwa sekitar 70% dari belanja APBD langsung digunakan untuk kebutuhan pegawai pemerintah daerah. Menurutnya, ironisnya masyarakat hanya menerima sepertiganya atau 30% saja. Ia mengatakan bahwa bagian dari anggaran tersebut harus diubah agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Jelas bahwa belanja modal, yang memiliki peranan yang sangat penting serta memiliki pengaruh besar bagi pembangunan daerah malah mendapatkan porsi yang kecil.

Fikri (2019) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif misalnya kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat A Koswara mengatakan bahwa total jalan di Jawa Barat sepanjang 2.360 kilometer sekitar 1.400 kilometer atau 60 persen jalan akan memasuki batas umur konstruksi. Ia mengatakan jalan yang sudah memasuki batas umur konstruksi harus dibongkar dan dibangun kembali. Estimasi biayanya Rp 4,3 triliun. Silondae (2016) menyatakan bahwa, dengan dibangunnya sarana transportasi, kegiatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembangunan pada kawasan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi akan lebih mudah dikembangkan.

Belanja modal juga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. PAD dijadikan alternatif sumber keuangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintah dengan maksud untuk mengurangi ketergantungan daerah pada subsidi pemerintah pusat. PAD bisa menjadi suatu masalah yang utama. Semakin besar peranan PAD didalam kerangka keuangan daerah semakin tinggi juga kapasitas keuangan yang dimiliki daerah (Rizal & Erpita, 2019).

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keeluasaan dalam pembelanjaan (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Karyadi & Tamam (2017), PAD memiliki pengaruh positif juga signifikan terhadap belanja modal. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhar (2017) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Selain PAD, dana alokasi umum (DAU) juga dapat menunjang pemerintahan daerah dalam melakukan pengembangan daerahnya. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah jumlah total alokasi anggaran negara yang digunakan

untuk menyeimbangkan sumber daya keuangan daerah dan menyediakan kebutuhan staf dan peralatan dari prakarsa desentralisasi (Siregar , 2017). Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari Dana Alokasi Umum dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana Alokasi Umum ini menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah. Dengan adanya transfer dari pusat yang berupa Dana Alokasi umum ini diharapkan agar pemerintah daerah mampu mengalokasikan pendapatan asli daerah yang diperoleh untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya (Karyadi & Tamam, 2017). Penelitian Karyadi & Tamam (2017) menyebutkan bahwa DAU memiliki pengaruh positif juga signifikan terhadap belanja modal. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryani dan Pariani (2018) yang menyatakan bahwa secara parsial variabel DAU mengalami pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, mengatakan bahwa sebagian besar TKDD itu, DAU (Dana Alokasi Umum) berkorelasi positif dengan belanja pegawai. Oleh karena itu, semakin besar DAU-nya, semakin habis untuk belanja pegawai. Sedangkan DAK (Dana Alokasi Khusus) yang nominalnya lebih kecil dari DAU justru memiliki korelasi terhadap belanja modal. Artinya, kata sri mulyani, belanja modal daerah sangat bergantung kepada transfer pusat. Dengan demikian, beliau mengatakan bahwa telah terjadi fenomena *crowding out*, yaitu ketika pemerintah daerah menggunakan DAK sebagai sumber utama belanja produktif. Padahal Fungsi utama DAK adalah untuk melengkapi total anggaran

TKDD dan APBD. Di sisi lain, ia menekankan kecilnya persentase (24,7%) pendapatan daerah yang diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota (Akbar, 2021).

Kemudian naik turunnya anggaran belanja modal pada daerah Provinsi Jawa Barat seperti ini akan berdampak terhadap kinerja keuangan pemerintahan karena belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun, dan sebaliknya. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan maka akan semakin meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan.

**Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum
2019	44.150,91 M	36.386,22 M
2020	39.915,36 M	32.798,66 M
2021	45.351,78 M	32.619,06 M

*Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2023)*

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat bahwa dana alokasi umum Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan di setiap tahunnya dan dana alokasi khusus Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Selain itu, terjadi fluktuasi pada pendapatan asli daerah walaupun angkanya cenderung cukup tinggi. Seharusnya ketika PAD tinggi belanja modal juga tinggi karena idealnya peningkatan penerimaan juga diikuti peningkatan belanja modal. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani mengatakan: Secara nasional, PAD saat ini masih sangat terbatas dan masih sangat tergantung pada transfer ke daerah. Ketergantungannya mencapai 80,1%, dengan kontribusi PAD

hanya sekitar 12,87% (Olivia, 2018). Pengelolaan daerah yang tepat sesuai dengan aturan tidak diragukan lagi dapat meningkatkan efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah. (Prasasti, 2013).

Dana alokasi umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat ditujukan untuk pemerataan kekuatan keuangan pada setiap pemda sehingga diharapkan tidak ada ketimpangan keuangan antar pemda. Dengan adanya dana perimbangan yang besar setiap daerah dapat dialokasikan salah satunya untuk belanja modal. Selaras dengan PAD, semakin besar dana perimbangan yang diterima suatu pemda seharusnya mampu meningkatkan jumlah belanja modal suatu daerah tersebut. Akan tetapi, jika dilihat data dari [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id), jumlah Belanja Modal Provinsi Jawa Barat cenderung turun sejak 2019 hingga 2021. Padahal jika ditinjau dari jumlah dana perimbangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat cenderung besar dan meningkat sejak tahun 2019 hingga 2021.

Dalam konteks pemda, ruang lingkup anggaran menjadi signifikan dan relevan. Hal tersebut berkaitan dengan pengaruh anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah dalam rangka tugas pemerintah untuk meningkatkan pelayanan. Selain itu, DPRD akan memantau kinerja anggaran pemerintah melalui anggaran. Kewenangan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat (Danius, 2022). Sebagai sarana penanggulangan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah harus mampu menyalurkan anggaran belanja modal secara efektif sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik. Sesuai dengan berbagai kewenangan yang diberikan, anggaran diberikan kepada tingkat pemerintahan yang rendah dari

tingkat pemerintahan yang tinggi demi mendukung tugas dan fungsi pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

**Tabel 1.3 Tingkat Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Presentase Kemandirian
2019	44.150,91 M	68.777,85 M	64%
2020	39.915,36 M	67.159,91 M	59%
2021	45.351,78 M	69.736,25 M	65%

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2023)

**Tabel 1.4 Tingkat Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Target Penerimaan PAD	Presentase Desentralisasi fiskal
2019	44.150,91 M	43.049,79 M	102,56%
2020	39.915,36 M	50.219,92 M	79,48%
2021	45.351,78 M	49.585,57 M	91,46%

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2023)

**Tabel 1.5 Tingkat Rasio Ketergantungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021**

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan	Presentase Ketergantungan
2019	68.777,85 M	131.242,24 M	52%
2020	67.159,91 M	124.296,09 M	54%
2021	69.736,25 M	131.908,84 M	52%

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2023)

**Tabel 1.6 Rasio Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total Pendapatan	Presentase Desentralisasi fiskal
2019	44.150,91 M	131.242,24 M	36%
2020	39.915,36 M	124.296,09 M	32%
2021	45.351,78 M	131.908,84 M	34%

*Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2023)*

Berdasarkan keempat tabel diatas bisa dilihat rendahnya Rasio Kemandirian dari tahun 2019 sampai 2021 dimana persentase berada pada presentase yang kriterianya tergolong rendah. Begitu juga dengan presentase rasio efektivitas PAD daitahun 2020 dan 2021 kurang dari 100% yang tergolong belum efektif serta presentase rasio ketergantungan lebih dari 50% yang tergolong cukup besar. Sedangkan tujuan pelaksanaan otonomi adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah serta dilaksanakannya desentralisasi fiskal adalah untuk mengurangi ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa Provinsi baik Kabupaten/Kota di Jawa Barat memiliki kinerja keuangan yang rendah. Rendahnya kinerja keuangan tersebut akan berdampak terhadap kemandirian daerah Provinsi Jawa Barat dalam membiayai keperluan belanja yang menyebabkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Sedangkan, pemerintah memiliki instrumen kebijakan desentralisasi fiskal yang berarti penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Putri & Rahayu (2019) menunjukkan kinerja keuangan berupa

derajat desentralisasi daerah, kemandirian keuangan daerah, dan efektivitas PAD berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal, secara simultan juga berpengaruh. Sedangkan penelitian Devi, Masnila, & Nurhasanah (2022) bahwa rasio ketergantungan pada keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja modal.

Selain itu, alasan peneliti menggunakan Provinsi Jawa Barat dalam penelitian ini adalah Provinsi Jawa Barat memiliki beberapa perbedaan dan prestasi dibandingkan dengan provinsi lain khususnya pada tahun 2019, 2020, 2021. Pada 2020, ITB dari Bandung menduduki peringkat ke-50 dalam QS World University Rankings yang mencerminkan kualitas pendidikan tinggi di provinsi ini (Atmaja et al., 2021). Lalu, Jabar memiliki pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dengan kontribusi dari berbagai sektor seperti manufaktur, pertanian, dan pariwisata (Jabarprovgoind, 2023). Pada 2021, Jabar berhasil menarik investasi dalam skala besar, memperkuat daya saing ekonomi daerah (Nengsih, 2021). Saat pandemi, Jabar menghadapi tantangan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah provinsi secara aktif berupaya untuk mengendalikan penyebaran virus dengan langkah-langkah seperti pembatasan sosial dan peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Jabar juga berusaha mengembangkan inovasi teknologi dalam beberapa sektor, termasuk pertanian dan pelayanan publik (Gartika et al., 2022). Hal tersebut termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan akses layanan bagi masyarakat.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Provinsi Jawa Barat kurang mampu dalam mengatur anggaran belanja modal yang akan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan wilayahnya. Sedangkan, belanja modal sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya melalui beberapa pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah, seperti penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, belanja di bidang pendidikan, dan lain-lain. Sehingga, untuk dapat menyusun jumlah anggaran belanja modal dengan tepat yaitu dengan cara meningkatkan kinerja keuangan daerah pada Provinsi Jabar. Azhar (2017) menyatakan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini bertujuan untuk menambah aset tetap yang dimiliki.

Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Dengan terpenuhinya fasilitas publik maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap belanja modal yang penulis tuangkan dalam judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti merumuskan masalah antara lain:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021?
3. Apakah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Kemandirian berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021?
4. Apakah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Efektivitas PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021?
5. Apakah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Ketergantungan berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021?
6. Apakah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021?
7. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Secara Bersama Sama berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021?

### C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk Menganalisis Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021
2. Untuk Menganalisis Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021
3. Untuk Menganalisis Apakah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Kemandirian berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021
4. Untuk Menganalisis Apakah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Efektivitas PAD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021
5. Untuk Menganalisis Apakah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Ketergantungan berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021
6. Untuk Menganalisis Apakah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Desentralisasi Fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021.
7. Untuk Menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Secara Bersama Sama

terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat  
Periode 2019 – 2021

#### **D. Manfaat**

##### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bisa menambah informasi, wawasan dan acuan dalam menilai Belanja Modal. Berdasarkan hasil perhitungan Analisis Rasio Keuangan terhadap APBD serta dapat menjadikan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Pemerintahan.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam memberi pemahaman terkait teori akuntansi sektor publik dalam praktik penerapannya pada pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat serta untuk melatih kemampuan peneliti dalam melaksanakan penelitian.

###### b. Bagi Instansi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan manfaat, membantu mengantisipasi atau memecahkan masalah yang ada di kota maupun kabupaten di provinsi Jawa Barat yang dapat berguna bagi pemerintahan dalam pengambilan keputusan juga diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemda di berbagai wilayah.

###### c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Temuan penelitian diharapkan dapat meningkatkan khasanah Ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang akuntansi pemerintahan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan penelitian ini berpotensi untuk memajukan pengetahuan ilmiah dan berfungsi sebagai salah satu sumber bagi peneliti masa depan atau peneliti selanjutnya

## **E. Sistematika Pembahasan**

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Hal ini ditempatkan dibagian awal skripsi dengan tujuan agar dapat dipahami mengapa peneliti meneliti ini.

### **Bab II Landasan Teori**

Bab ini akan menguraikan kerangka teori yang didalamnya memuat teori-teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Alasannya untuk mengetahui teori apa yang dikaji dalam penelitian ini.

### **Bab III Metode Penelitian**

Metode penelitian pada bab ini berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel, dan metode analisis data.

### **Bab IV Hasil dan Pembahasan**

Pada bab IV berisi hasil analisis data dan pembahasan yang

didapatkan melalui metode yang telah dideskripsikan pada metode penelitian dan penafsiran terkait hasil analisis data yang telah diuji.

#### Bab V Kesimpulan

Bab ini merupakan bab akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan juga saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Ditemukan dalam penelitian bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi Belanja Modal dengan positif dan signifikan pada seluruh kabupaten dan kota provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan yang didapat oleh daerah dalam bentuk PAD, akan dibarengi pula dengan peningkatan alokasi anggaran untuk Belanja Modal.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan pengaruh positif dan hubungan yang signifikan terhadap Belanja Modal pada seluruh kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar DAU yang diberikan pemerintah pusat, maka alokasi anggaran untuk Belanja Modal juga akan bertambah.
3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berupa Rasio Kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan kata lain masih pemda masih bergantung pada pemerintah pusat. Seharusnya pemerintah daerah kabupaten dan kota provinsi Jawa Barat harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat salah satunya dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada.
4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berupa Rasio Efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil ini

membuktikan bahwa kondisi yang terjadi kemungkinan disebabkan oleh tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat cenderung diabaikan maka pengalokasian belanja modal tidak terealisasi dengan efektif dan dapat menghambat pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik. Sementara dana pada anggaran daerah yang pada dasarnya merupakan dana publik sebagian besar dibelanjakan untuk belanja pegawai, sehingga pemerintah perlu melakukan reservasi dan identifikasi ulang terhadap jumlah kebutuhan alokasi dana dari seluruh kegiatan secara lebih akurat dan detail sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik.

5. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berupa Rasio Ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini bahwa pemda kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat dikatakan belum memiliki kemandirian yang maksimal sehingga dalam mengalokasikan dana belanja modal masih memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
6. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berupa Rasio Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan namun dengan arah hubungan yang negatif terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan ini sangat kurang dalam kinerjanya yang dilihat dari derajat desentralisasi tahun anggaran 2019-2021. Dengan kata lain, dalam tiga tahun anggaran pada pemerintah Kabupaten dan kota provinsi Jawa Barat belum optimal

penyelenggaraan desentralisasi dengan meningkatkan kontribusi PAD yang semakin tinggi pada kurun waktu satu periode berjalan

## **B. Keterbatasan Penelitian**

1. Dalam penelitian ini terdapat masalah pada uji autokorelasi yang mulanya belum terbebas dari uji autokorelasi. Oleh karena itu dalam pengujian autokorelasi *Durbin-Waston* menggunakan metode *Cochrane-Orcutt* sehingga dapat terbebas dari uji autokorelasi.
2. Penelitian ini dilakukan hanya terbatas dengan menggunakan beberapa variabel saja

## **C. Saran**

1. Saran untuk kegunaan akademik yakni penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi pada umumnya dan khususnya mengenai akuntansi sektor publik.
2. Saran untuk penelitian lanjutan yakni agar bisa merubah/menambah variabel independen yang ada dalam penelitian ini dengan variabel DAK, SILPA dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap belanja modal serta hubungan antar variabel tersebut.
3. Dalam variabel kinerja keuangan pemda, peneliti hanya menggunakan beberapa rasio saja sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk meneliti dengan lebih lengkap pada penggunaan rasionya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, D. Z. I., Hendayana, Y., Hidayat, F., Handini, D., Herlina, N., Priandono, T. E., Napitupulu, E., Maek, I., Rhisky, N., Suwitno, Santosa, J., Taufik, M., Herlina, S., Fajri, M. S., Kusuma, A., Purwadi, Puspaputri, E., & Setyawati, N. (2021). Kaleidoskop 2020, Membangun Sinergi, Membangun Kolaborasi. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Issue Mi). Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Ri.
- Baldrig Siregar. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Upp Stim Ykpn.
- Bappeda Jabar. (2021). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021*. [Http://Bappeda.Jabarprov.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2020/08/Rkpd-Provinsi-Jawa-Barat-Tahun-2021.Pdf](http://Bappeda.Jabarprov.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2020/08/Rkpd-Provinsi-Jawa-Barat-Tahun-2021.Pdf)
- Barat, K. D. P. P. J. (2021). *Kajian Regional Fiskal Tahun 2021*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Danius, R. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020. *Skripsi*.
- Gartika, D., Ramon, Diana, M., Hapiah, Y., Khotimah, F. K. H., Gumilar, & Nursidiawati, I. (2022). *Laporan Kajian Evaluasi Implementasi Dan Strategi Optimalisasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe)*. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Haryanto, J. T. (2018). Kemandirian Daerah Dan Prospek Ekonomi Wilayah Kalimantan. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(4), 312–328. <https://doi.org/10.33105/itrev.V3i4.88>
- <https://jabarprov.go.id/berita/ridwan-kamil-pertumbuhan-ekonomi-jabar-tertinggi-se-pulau-jawa-8388>
- <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2019/12/20/164837617027956-evaluasi-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah-sebagai-sumber-pendapatan-daerah>
- Indonesia, B. P. K. R. (2021). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020. In *Lhr Kemandirian Fiskal Pemda Tahun 2020*.
- Karyadi, S. A., & Tamam, A. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2011-2014. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 1–15.
- Nengsih, N. K. (2021). *Laporan Realisasi Investasi Pma Dan Pmdn Provinsi Jawa*

- Barat. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.  
[https://Dpmpptsp.Jabarprov.Go.Id/Asset\\_New/Laporan/Kajian\\_Investasi/Laporan Kajian Realisasi Investasi Tw 4 2021.Pdf](https://Dpmpptsp.Jabarprov.Go.Id/Asset_New/Laporan/Kajian_Investasi/Laporan_Kajian_Realisasi_Investasi_Tw_4_2021.Pdf)
- Prasasti, S. E. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Diy Tahun 2007-2013). *Universitas PGRI Yogyakarta*, 1–13.
- Purpitasari, P. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4(11), 1–16.
- Sukmaji, D. D., & Rohman, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(4), 1–9.
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(2), 98–114. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>
- Vanesha, V. T., Rahmadi, S., & Parmadi, P. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(1), 27–36. <https://doi.org/10.22437/Paradigma.V14i1.6609>
- Abdullah, S & Halim, A. (2004). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi VI*, hal 1140-1159.
- Akbar, C. (2021). *Sri Mulyani Soroti Dana Alokasi Umum untuk Daerah Habis Buat Belanja Pegawai*. <https://bisnis.tempo.co/read/1505585/sri-mulyani-soroti-dana-alokasi-umum-habis-buat-belanja-pegawai>
- Anthony, R. N., & V. Govindarajan. (2005). *Management control systems*. Jakarta: Salemba Empat.
- Azhar, A. A., & Hermanto, S. B. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6 (8).
- Danius, R. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020. *Skripsi*.
- Devi, A. S., Masnila, N., & Nurhasanah. 2022. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah

Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Politeknik Negeri Sriwijaya*, 4 (6).

- Dwirandra, A., & Martini, K. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5(1).
- Fathiyah, F., Iskandar N, Pasla, B. N., Rasid, Fahmi., & Arif, Muhammad. (2022). Ratio Analysis of Regional Dependence and Independence in Measuring the Regional Financial Capability of the Jambi Provincial Government. *Jurnal Prajaiswara*, 3(1), 65–74.
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Inovasi*, 14(1), 44–52.
- Fikri, A. (2019) *60 Persen Jalan Provinsi Jabar Akan Memasuki Batas Umur Konstruksi*. <https://bisnis.tempo.co/read/1243678/60-persen-jalan-akan-memasuki-batas-umur-konstruksi>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: UNDIP
- Hairiyah., Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman*, 14 (2).
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara*, 784–799.
- Harahap, Heri Faisal. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Journal of Economics and Business*, Vol. 4, No.1
- Huda, S. & Sumiati, A. (2020). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 6(3), 480–487.
- Ikhsan, A., & H.B Suprasto. (2008). *Teori Akuntansi dan Riset Multiparadigma*. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Jayanti, F. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum , Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. *Jurnal Emba*, Vol. 8, No. 3

- Jefri, Riny. (2018). Teori Stewardship Dan Good Governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI Unibos Makassar, Vol. 4, No. 3*
- Juniawan, M. A. (2018). Pengaruh PAD, DAK dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No.3*
- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 3*
- Karlimat, D., Rachman, D., & Anggareni, I. 2022. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Garut Periode 2010-2019. *Jurnal Ilmiah Akuntansi 13 (1), 27-37*.
- Karyadi, S. A., & Tamam, A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2011-2014. *Jurnal Pendidikan Akuntansi, 1-15*.
- Kristianus, A. (2022). *Pembatasan Belanja Pegawai Beratkan Pemda*. <https://investor.id/business/289773/pembatasan-belanja-pegawai-beratkan-pemda>.
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Nasution, Leni Masnidar. (2017). Statistik Deskriptif. *Jurnal Hikmah, 14 (1)*
- Nugraha, Billy (2022). *Pengembangan Uji Statistik*. Sukoharjo: Pradina Pustaka.
- Nugroho, F., & Rohman, A. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Undip, 1 (2), 1-14*.
- Oktriniatmaja, R. (2011). Pengaruh Pendapatan asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. *Tesis*.
- Olivia, G. (2018). *Menkeu: Ketergantungan APBD Pada Dana Transfer Daerah Sangat Tinggi*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

- Putri, R. S., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi*, 3(2).
- Prasasti, S. E. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DIY Tahun 2007-2013). *Universitas PGRI Yogyakarta*, 1–13.
- Purpitasari, P. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4(11), 1–16.
- Riviando, A., Agustin, H., & Halmawati. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*.
- Rizal, Y., & Erpita. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika, Vol. 3, No. 1*
- RM, R. D. C., & Mulyani, H. (2012). *Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Barat*. 47–57.
- Salsabila, N. F., & Rahayu, S (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2019 dan 2020). *E-Proceeding of Management*, 8(5)
- Silondae, S. (2016). Keterkaitan Jalur Transportasi dan Interaksi Ekonomi Kabupaten Konawe Utara Dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. UPP STIM YKPN.
- Sularso, Havid., & Restianto, Y, E. (2011). *Media Riset Akuntansi*, 1 (2).
- Supriyadi, A. P., & Ahmad, F. (2021). Analisis Rasio Efektivitas PAD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Jakarta periode 2015-2019. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 39–43.
- Suryani, F., & Pariani, E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*, 6(1), 12–22.

- Thomas, V. F. (2019). *70% APBD Buat Urusan PNS, Sri Mulyani Minta Pemda Potong Uang Dinas*. <https://tirto.id/70-apbd-buat-urusan-pns-sri-mulyani-minta-pemda-potong-uang-dinas-elFh>.
- Tiara, ferani inggrid. (2016). Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota Di. *Ilmu Ekonomi FEB Universitas Brawijaya*.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Usman. (2021). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Wahyuningsih, P., & Widaryanti. (2015). Peningkatan PAD dan DAU terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*
- Widyastuti, Tri. (2017). *Akuntansi Biaya; Pendekatan Activity Based Costing*. Yogyakarta: Expert.
- Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau Dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, Dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik Vol. 5, No.2*.
- Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Jurnal Cakrawala - Repositori IMWI*.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS DIRI

Nama : Indah Wulandari Wilujeng  
NIM : 4319154  
Tempat Tanggal Lahir: Pekalongan, 31 Juli 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nama Ayah : Moekhammad Toelus  
Nama Ibu : Ekha Lestari  
Alamat : Ds. Kauman RT07/RW04 Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan

### RIWAYAT HIDUP

- |                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| 1. RA Muslimat Kauman                   | Lulus Tahun 2007 |
| 2. MI Salafiyah Kauman                  | Lulus Tahun 2013 |
| 3. SMPN 1 Wiradesa                      | Lulus Tahun 2016 |
| 4. SMKN 2 Pekalongan                    | Lulus Tahun 2019 |
| 5. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan | Lulus Tahun 2023 |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Pekalongan, 9 Juli 2023

Penulis



Indah Wulandari Wilujeng